

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Abad ke-21 merupakan periode penting bagi negara-negara Asia. Sejak awal 2000-an, kebangkitan Cina mulai menggeser poros peradaban dunia. Semula, para aktor internasional berfokus pada peningkatan kerjasama di Barat. Dewasa ini, Barat bahkan menganggap kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan penting yang perlu mereka kuasai. Bangsa Barat yang mengalami banyak masalah seperti krisis ekonomi, *proxy war*, serta isu-isu domestik mengalami sedikit kemunduran. Tidak signifikan, tetapi cukup untuk membuat negara-negara berkembang menyusul ketertinggalan mereka. Kebangkitan Tiongkok membuat kondisi *re-balancing* politik internasional. Lambat laun, Cina menjelma menjadi negara adidaya yang mampu bersaing dengan Amerika Serikat. pada akhirnya, situasi antara Cina dan AS membuat pola politik internasional berubah dari unipolar menjadi bipolar. Semangat kebangkitan Cina menular, atau lebih tepatnya mempengaruhi, negara-negara di sekitarnya. Maka dari itu, fenomena ini juga dianggap sebagai kebangkitan Asia.

Indonesia sebagai salah satu negara kawasan memberikan banyak perhatian pada rivalitas negara adidaya. Dua periode kepresidenan, yakni SBY dan Jokowi, telah menghasilkan banyak kebijakan luar negeri untuk mengatasi turbulensi di kawasan. Indonesia juga ditantang untuk dapat memiliki pengaruh yang lebih besar. Pandangan yang berbeda serta situasi kawasan yang fluktuatif selama rentang

waktu tersebut pun menyebabkan adanya *continuity and change* dalam kebijakan luar negeri di masa SBY dan Jokowi. Namun, hal-hal ini tidak menyurutkan semangat Indonesia dalam membangun arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan inklusif.

Indonesia tidak memilih tampil sebagai negara dominan, tetapi mendorong ASEAN sebagai *driving force* kerja sama regional. Sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan ASEAN dalam menyelesaikan ketegangan di kawasan. Indonesia berusaha meningkatkan peran dan pengaruh ASEAN bukan hanya di Asia Tenggara melainkan sampai di Indo-Pasifik. Kawasan ini merupakan tantangan besar bagi aktor manapun, sebab menyimpan banyak potensi dan tantangan. Maka dari itu, ASEAN tidak boleh salah langkah untuk mengatur agenda Indo-Pasifik. Di samping terlibat langsung, organisasi ini pun berusaha memfasilitasi kerja sama di kawasan. Rizal Sukma menyebut organisasi ini sebagai *bridge builder* (pembangun jembatan). Sebab, ASEAN memiliki komitmen dan loyalitas tinggi dalam mewujudkan pembangunan arsitektur kawasan hingga hari ini.

ASEAN dibekali dengan *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Sejak dua dekade terakhir, kedua gagasan sama-sama memberikan pandangan sekaligus strategi geopolitik dalam menghadapi dinamika kawasan. Namun, keduanya juga berbeda dari segi luaran atau *output*. Meskipun digagas oleh satu pemerintahan negara, yakni Indonesia, tetapi mereka lahir dari dua masa kepresidenan yang berbeda. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menelisik lebih

rinci tentang karakteristik apa yang membuat kedua gagasan ini serupa tetapi tidak sama.

Perbedaan kedua gagasan dapat ditemukan dalam komponen prinsip-prinsip yang terkandung di dalam gagasan, luaran gagasan, serta bagaimana kedua gagasan memandang kawasan Indo-Pasifik. Pertama, perbedaan dalam prinsip, terutama dari segi kuantitas butir. Doktrin Natalegawa hanya memiliki dua butir prinsip, yakni persahabatan dan kerja sama. Sedangkan, AOIP terdiri atas tiga belas prinsip yang dapat ditemui dalam dokumen akhir gagasan tersebut. Perbedaan kedua terletak pada luaran gagasan. *Dynamic Equilibrium* disebut sebagai doktrin karena dalam proses perumusannya tidak melalui tahap interpretasi dari masing-masing negara anggota ASEAN. Sebaliknya, AOIP justru melalui proses negosiasi yang sangat panjang di antara negara-negara anggota. Perbedaan terakhir terletak pada pandangan gagasan terhadap kawasan Indo-Pasifik. Kedua gagasan ini unik karena memiliki versi masing-masing soal apa yang disebut dengan “Indo-Pasifik”. Doktrin Natalegawa menganggap Indonesia dan ASEAN berada di tengah bentangan segitiga yang berada di laut Pasifik dan Hindia. Segitiga disini mengacu pada keberadaan tiga negara besar di sekitar Asia Tenggara, yakni India, Jepang, dan Australia. Inilah kawasan Indo-Pasifik beserta posisi yang dimaksud dalam ide *Dynamic Equilibrium*. Sedangkan, AOIP menganggap Indo-Pasifik terdiri dari dua teritori yang berbeda, yakni Samudera Hindia dan Pasifik.

Beralih pada persamaan karakteristik, penulis menemukan dua buah komponen yang sama dalam kedua gagasan. Pertama adalah peran sentral ASEAN di dalam gagasan. Banyak perdebatan mengenai pemerintahan SBY dan Jokowi

yang melakukan redefinisi lingkaran konsentris kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, faktanya kedua presiden tetap kembali pada peran pemimpin ASEAN. Di samping itu, kedua gagasan juga sama-sama meletakkan ASEAN sebagai sentral dari seluruh agenda kerja sama di kawasan. Persamaan kedua terletak pada orientasi gagasan. Kedua gagasan sama-sama menghendaki adanya kerja sama yang komprehensif. Kerja sama di era SBY maupun Jokowi masih cenderung berfokus pada bidang ekonomi. Kerja sama ekonomi bagaikan resep paling manjur untuk membuat negara-negara berhenti berperang dan saling memberikan keuntungan. Sehingga, tujuan Indonesia dan ASEAN dalam membentuk Indo-Pasifik damai, sejahtera, dan inklusif dapat segera tercapai.

Dari *Dynamic Equilibrium* dan AOIP, kita dapat melihat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia sarat akan spirit liberalisme institusionalis. Hal pertama yang sangat disoroti adalah bagaimana Indonesia berusaha menyediakan rezim yang mengatur kerja sama di Indo-Pasifik. Secara umum, sebenarnya kedua gagasan dapat disebut sebagai rezim karena mampu memfasilitasi kerja sama di Indo-Pasifik. Klaim tersebut berdasarkan pada dua alasan. Pertama, kedua gagasan mengandung seperangkat norma atau aturan untuk mencapai kepentingan negara. Kerja sama berbasis aturan (*rule-based*) terus dipromosikan oleh ASEAN kepada negara-negara mitra eksternal dalam rangka mewujudkan kawasan yang damai, sejahtera, dan inklusif. Alasan kedua adalah karena gagasan-gagasan ini mendorong negara supaya patuh terhadap perjanjian kerja sama yang telah mereka setujui. Kedua gagasan tidak menuntut kepatuhan secara kaku, melainkan melalui rekomendasi atau seruan untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku di kawasan.

Ketika negara-negara besar berkenan turut serta dalam *agenda setting* yang telah ditetapkan oleh ASEAN, ini tandanya rezim internasional sudah bekerja secara optimal. Gagasan Indonesia yang disumbangkan kepada ASEAN ini juga membuat ASEAN menjadi poros ketiga di kawasan. Kekhawatiran negara besar akan adanya aktor lain yang mendominasi kawasan pun dapat dipatahkan. Indonesia tidak muncul sebagai aktor dominan, melainkan mendorong ASEAN sebagai jembatan dan aktor sentral dalam menghadapi turbulensi kawasan. Lebih lanjut lagi, penekanan pada pentingnya komunikasi, mengadakan dialog, serta negosiasi dalam penyelesaian konflik merupakan cara yang direkomendasikan oleh liberalisme institusionalis. Indonesia, lagi-lagi, menggunakan cara ini yang dapat dibuktikan melalui pernyataan-pernyataan elit politik serta perjanjian-perjanjian yang telah tercapai selama dua dekade terakhir. Poin terakhir, liberalisme institusionalis mengklaim bahwa pasar bebas dapat membuat entitas internasional saling terikat dan ketergantungan. Sehingga, mereka akan terfokus pada pengembangan ekonomi dibandingkan pada pengembangan militer. Paling tidak, pasar bebas memecah fokus para aktor pada dua hal, yakni keamanan dan kesejahteraan. Pada akhirnya, negara-negara lebih cenderung menjaga atau mengembangkan kerja sama, terutama dalam bidang ekonomi, untuk mendapatkan keuntungan serta mencapai perdamaian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* telah memperkuat teori liberalisme institusionalis.

1.2 Saran

Penulis memiliki saran untuk pemerintahan setelah periode Joko Widodo. Dalam upaya pembangunan arsitektur kawasan, pemerintah Indonesia sebaiknya mempertahankan spirit liberalisme institusionalis dalam kebijakan luar negeri. Formula dari teori ini telah membuahkan hasil memuaskan selama dua dekade terakhir. Pembangunan arsitektur kawasan yang damai, sejahtera, dan inklusif tidak dapat dilaksanakan hanya dalam waktu singkat. Jika pemerintah Indonesia benar-benar serius dalam proyek ini, seharusnya pemerintah memiliki kebijakan luar negeri yang berkelanjutan terhadap ASEAN dan Indo-Pasifik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan tetap menggunakan formula perdamaian dari liberalisme institusionalis. Fungsi dari kebijakan berkelanjutan ini adalah supaya pemerintahan pada periode baru tidak membangun fondasi kerja sama kawasan dari nol. Legasi mungkin tampak penting bagi pemerintahan baru, tetapi keberlanjutan adalah kunci untuk meraih tujuan besar di regional maupun di lingkup global.

Selanjutnya, saran penulis untuk penelitian di masa mendatang adalah mengangkat hubungan kausalitas dari perbandingan karakteristik kedua gagasan. Penelitian ini telah menjabarkan komponen-komponen yang sama maupun berbeda dari kedua gagasan. Namun, belum menjelaskan mengapa kedua gagasan memiliki persamaan sekaligus perbedaan karakteristik. Hubungan kausalitas dapat ditinjau melalui struktur dunia sebelum dan pada saat gagasan tercipta. Situasi global yang berubah-ubah dapat menjadi salah satu faktor penting penyebab terjadinya perbedaan dan persamaan karakteristik gagasan.

Terakhir, penelitian mengenai kausalitas juga dapat ditinjau melalui idiosinkratik individu di balik *Dynamic Equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the*

Indo-Pacific. Persamaan dan perbedaan karakteristik gagasan cukup menarik untuk dibahas dari faktor internal penggagasnya. Peneliti dapat membahas nilai dan pengalaman masa lalu tokoh-tokoh pencetus gagasan ini. Misalnya saja mengulik tentang idiosinkratik Marty Natalegawa sebagai pencetus *Dynamic Equilibrium* atau Rizal Sukma sebagai salah satu tokoh penting dibalik dokumen AOIP. Selain meneliti struktur si dunia, penelitian tentang pengaruh individu dalam kebijakan luar negeri juga sama-sama penting. Penelitian mengenai kedua gagasan ini perlu dilanjutkan karena menyangkut tujuan besar Indonesia di Indo-Pasifik. Artinya, penelitian ini akan tetap relevan selama Indonesia masih terus bekerja untuk menciptakan kawasan yang damai, sejahtera, dan inklusif.